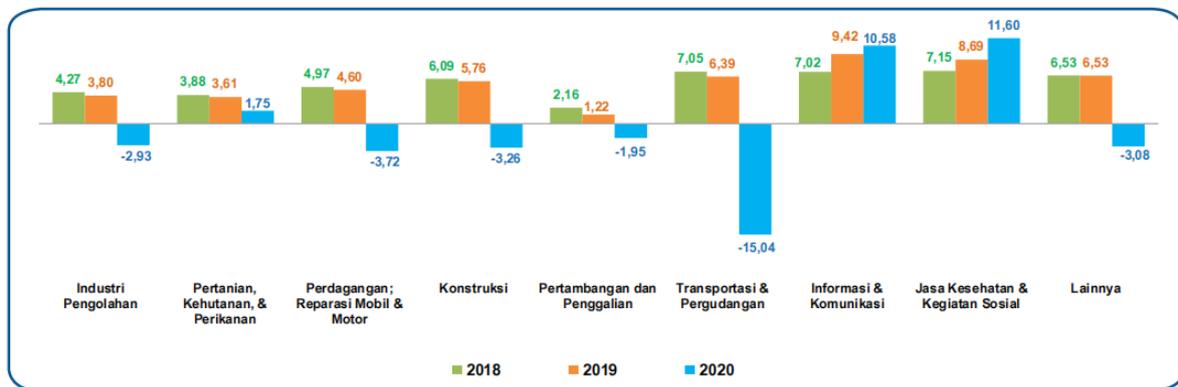


## BAB I

### A. Latar Belakang

Pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona atau dikenal dengan Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia, dan mengakibatkan sebuah ancaman bagi semua negara termasuk di Indonesia. Walaupun kesembuhan dari pasien terus mengalami peningkatan, dan sudah dijalankannya program vaksinasi dari pemerintah tidak dapat menjamin suatu peningkatan kondisi ekonomi yang menurun karena efek dari pandemi tersebut (Putri, 2020). Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan dari tahun 2019 dan 2018 karena dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi yang disebabkan dari Covid-19. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%, jasa perusahaan 5,44%, dan lain-lain yang dijelaskan pada gambar dari server BPS (BPS, 2021)



Gambar 1. Pertumbuhan Lapangan Usaha dari tahun 2018-2020

Dalam dunia usaha telah menghadapi berbagai masalah keuangan yang beraneka ragam dengan tingkat kerugian tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengungkapkan bahwasanya seluruh sektor bisnis di Indonesia mengalami kontraksi pendapatan, dimana untuk Usaha Menengah Kecil (UMK) sebesar 84,20 persen, kemudian Usaha menengah Besar

(UMB) sebesar 82,29 persen, dan yang terkena dampak terbesar pada aspek Akomodasi dan makan minum yang mencapai kontraksi sebesar 92,47 persen. Dari kontraksi ekonomi tersebut mengakibatkan beberapa kasus seperti penurunan gaji karyawan, merumahkan pegawai, dan efek paling buruk adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Situasi yang telah terjadi untuk beberapa UMKM yang terdampak Covid-19 menjadi kesulitan dalam aspek keuangan, dikarenakan tidak adanya transaksi penjualan yang berjalan sedangkan UMKM yang menjadi sebuah mata pencaharian utama akhirnya tidak dapat membiayai biaya operasional usahanya dan menutup usahanya. (data covid di bantu tahun 2020)

Adanya permasalahan Covid-19 yang terjadi sehingga mengakibatkan penurunan di semua sektor khususnya ekonomi hadirnya sebuah konsep dan gagasan dari Agile governance untuk memberikan sebuah tawaran birokrasi dengan pola pikir yang baru untuk membantu percepatan kenaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurut (Rahadian, 2019) Agile governance mempunyai sebuah makna sebagai sebuah bentuk skill dasar dalam dunia pemerintahan untuk dapat bertahan dan menyeimbangi sebuah arus perkembangan, serta mampu merespon apa yang diharapkan oleh warga dengan cara yang cepat dan efisien. Menurut dari (D. I. Kurniawan et al., 2021) Agile Governance dapat mencapai sebuah tujuan dari perkembangan pemerintahan saat ini. Untuk ukuran keberhasilan bagi implementasi *Good governance, Collaboratife Governance, dan Dynamic Governance* dapat dipengaruhi oleh bagaimana dari daerah tersebut mampu untuk mengolah dan memanfaatkan secara maksimal penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem Agile Governance yang dimiliki oleh suatu *industry* dapat diadopsi dan diterapkan dalam dunia pemerintahan, karena tujuan dari Agile governance adalah untuk mendorong seseorang agar bisa mengimplementasikan sistem dari tata kelola organisasi yang bersifat gesit, serta diharapkan agar mampu menuntaskan permasalahan anggaran, sebagai contoh seperti belum terpenuhinya

batas waktu yang telah ditentukan, rendahnya kualitas dari produk, dan kurangnya kepuasan dari konsumen.

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	<b>Skor Indeks 2021</b>	3,54	<b>Skor Indeks 2022</b>	3,49

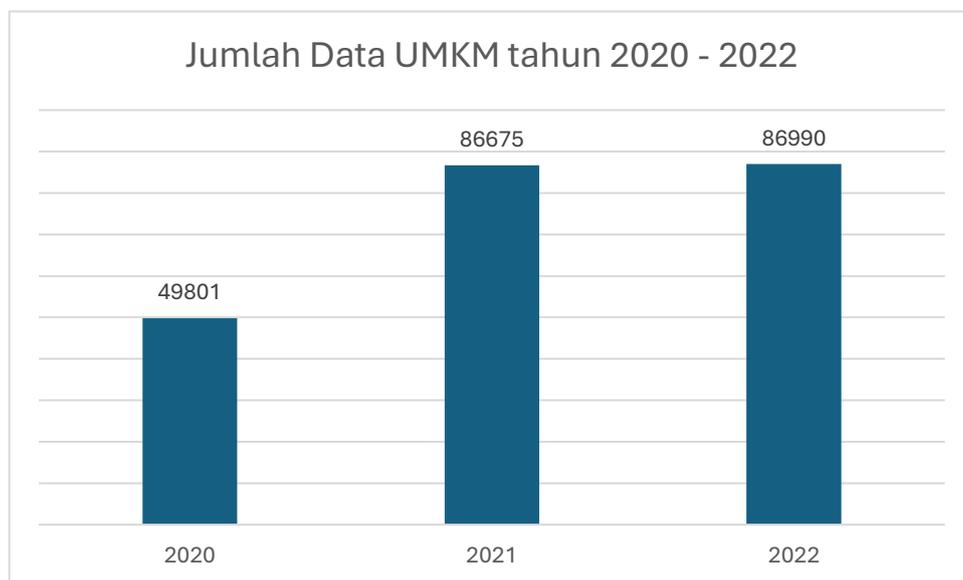
Gambar 2. Persentase literasi digital Indonesia

<https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>

Dalam sebuah era sekarang dimana teknologi adalah suatu hal utama yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari maka pemahaman akan literasi digital menjadi suatu hal keterampilan yang sangat penting (Kurnianingsih et al., 2017). Literasi digital menurut (Maulana, 2015) merupakan sebuah kemampuan dari seseorang untuk menggunakan teknologi digital, dan berguna untuk mencari, memahami, membuat, mengevaluasi, dan berbagi informasi secara aman dan efektif Suatu organisasi, pemerintahan, ataupun unit usaha UMKM yang ingin mempunyai sebuah kenaikan pendapatan pada sektor ekonomi diwajibkan pada staff atau karyawan mereka agar sanggup melek digital, adaptif, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Di Indonesia pada gambar diatas dapat disimpulkan tahun 2022 mengalami kenaikan dengan angka 3,54% dalam literasi digital dibanding tahun 2021 dengan angka 3,49%. Akan tetapi pada DI Yogyakarta mengalami penurunan minat dalam literasi

digital, pada tahun 2021 DI Yogyakarta 3,71% dan pada tahun 2022 menjadi 3.64(Agustini, 2023).

Maka dari pengertian Agile Governance lalu dihubungkan dengan literasi digital dapat memunculkan berbagai keuntungan, karena Agile Governance mendorong agar seseorang dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis ataupun pemerintahan. Kemudian literasi digital dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengelola sistem marketing online.



Gambar 3. Data UMKM Bantul 2020-2022

[https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data\\_dasar/index/107-umkm](https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm)

Kabupaten Bantul, Yogyakarta di tahun 2020 hingga 2022 mengalami dinamika perkembangan ekonomi dalam hal pendapatan per UMKM. Dari gambar diatas dijelaskan bahwa tahun 2020 jumlah UMKM bantul berjumlah 49801, tahun 2021 berjumlah 86675, dan pada tahun 2022 berjumlah 86990. Walaupun pada tahun 2020 Kabupaten Bantul Sesuai informasi dari BPS Kab. Bantul disebutkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantul

tahun 2020 sebesar -1,66 persen, mengalami penurunan sangat drastis akibat dari dampak Covid-19 dibanding dari tahun sebelumnya 5,53 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bantul tahunan sebesar 26,16 Triliun Rupiah atau PDRB Perkapita Kab. Bantul sebesar 25 juta rupiah. Oleh karena itu pada tahun 2020 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Bantul mengalami penurunan sangat tinggi karena kebijakan dari pemerintah Yogyakarta Surat Edaran Nomor 061/5493/SE/2020 untuk Work Form Home (WFH). Data pada tahun 2020 mengatakan bahwa jumlah UMKM Bantul berjumlah 49.801 dari pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 48.148. Keadaan ini mendorong masyarakat Kabupaten Bantul untuk bisa beradaptasi ditengah dampak pandemi Covid-19 dengan cara mengalihkan kebiasaan berjualan produk usaha dengan metode bisnis offline diganti dengan metode bisnis online. Bisnis digital bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu bertemu dengan konsumen.

Menurut data dari (Sidakui, 2023) UMKM yang sudah Go digital hanya berjumlah 94.019 UMKM. Dari jumlah tersebut sangat tidak relevan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang berada di Kabupaten Bantul yang berjumlah 128.000 (bappeda.jogjaprov.go.id, 2023). Dari data tersebut menunjukkan kurangnya akan penerapan literasi digital di UMKM. Peran Pemerintah Kabupaten Bantul terlihat kurang mensosialisasikan program-programnya atau dari masyarakatnya sendiri yang kurang akan informasi untuk beralih ke platform digital. Upaya terwujudnya sebuah sistem Agile Governance di Kabupaten Bantul tergantung juga kepada kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Darumurti et al., 2023)

Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2020 hingga 2022 perlu diterapkannya sebuah literasi digital, agar masyarakat Kabupaten Bantul bisa memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan situs web untuk meningkatkan penjualan mereka secara online. Sebagai contoh Pemerintah (peran pemerintah kab bantul). Inovasi dari literasi digital menjadi salah satu analisis menarik apabila dilihat dari kaca mata Agile Governance.

Konsep dari agile governance menjadi sebuah konsep yang trend akhir-akhir ini dengan enam prinsipnya menurut (Zahra et al., 2022) UMKM yang dimana enam prinsip tersebut berisi tentang: *Good enough governance*, *buseniss driven*, *Human Focused*, *Based on quick wins*, *Systematic and Adaptive approach*, dan *Simple Design and continuous refinement* dari suatu daerah diharapkan mampu mencapai titik atas keberhasilan daerah yang sejahtera sehingga jika digabungkan dengan literasi digital akan menjadikan sebuah hasil akhir yang memuaskan. Akan tetapi jika mengacu pada judul penelitian konsep Agile Governance pada tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Bantul masih sangat minim diterapkannya dengan literasi digital.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena melihat perkembangan UMKM di Kabupaten bantul pada saat Pandemi Covid ataupun sesudah Pandemi Covid dengan cara menggunakan literasi digital karena dinilai mampu mengembangkan potensi bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dan diterapkannya konsep Agile governance agar pelaku UMKM bergerak secara responsive serta collaborative karena perubahan dunia bisnis yang dinamis. Oleh karena itu penelitian ini akan mengambil rumusan masalah yakni:

- 1. Bagaimana Implementasi Agile Governance dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2020-2022?**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi literasi digital bagi pelaku UMKM?**

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari Agile Governance dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM Kabupaten Bantul pada tahun 2020 hingga 2022 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan mengetahui dinamika dari implementasi tersebut maka peneliti mampu untuk semakin memperdalam kajian analisis secara lebih jauh serta dapat memberikan manfaat yang kongkrit

baik dalam wujud penelitian maupun sebagai bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Bantul agar untuk tahun kedepannya sebuah implementasi Agile Governance lebih baik.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Pemerintahan secara umum. Kemudian kajian mengenai Agile Governance di Indonesia masih minim khususnya di Kabupaten Bantul. Maka penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas konsep Agile Governance dalam penelitian yang berkelanjutan bagi isu-isu yang terkait oleh literasi digital.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan responsibilitas yang cepat terhadap perubahan dengan mengaitkan pemerintah Kabupaten Bantul dan stakeholder agar bisa membantu dalam proses kebutuhan literasi digital. Kemudian dihubungkan dengan pendekatan konsep Agile Governance dimana dapat membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya dengan memfokuskan hal-hal yang bersifat urgent terlebih dahulu. Dengan dilakukannya sebuah sosialisasi mengenai konsep agile government dan literasi digital bagi pelaku UMKM dapat sangat membantu untuk menunjang kebutuhan ekonomi yang lebih layak.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Literasi Digital

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka Literasi Digital

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ismah et al., 2020)	Pengembangan UMKM Melalui Literasi Digital pada Era 4 . 0 Untuk Meningkatkan Minat Berwirausaha Digital Literacy Training in The Era of 4 . 0 for Small	Pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar kepada ibu-ibu PKK sebagai anggota Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kalurahan Kemijen kota Semarang untuk memahami cara mengembangkan UMKM dan mempromosikan produk

		Businesses to Increase Entrepreneurship Intention	di era digital secara online. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini merupakan sebuah wawasan pengetahuan dan pemahaman dari anggota UMKM tentang bagaimana mengembangkan sikap mandiri dan kolaboratif serta menumbuhkan minat berwirausaha secara digital.
2	(Nurfitriya et al., 2022)	Peningkatan Literasi Digital Marketing UMKM Kota Tasikmalaya	Literasi digital marketing pada Tasikmalaya tergolong cukup rendah karena kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM mengenai hal <i>marketing digital</i> . Berdasarkan persentase mengenai pemahaman dari digital marketing dengan rata-rata skor 73, nilai terendah berada pada 66, dan nilai tertinggi pada 88. Selain itu masyarakat Tasikmalaya masih belum optimal akan penggunaan platform e-commerce. Dimana media dalam promosi produknya masih menggunakan Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Padahal perkembangan teknologi saat ini sudah kian melesat tinggi dan dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi karena kurangnya tingkat literasi digital marketing bagi pelaku UMKM di Tasikmalaya, mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan media promosi yang sudah ada. Berdasarkan hasil survei 93% UMKM di Tasikmalaya belum menggunakan media website sebagai media promosi untuk pemasaran dari usahanya. Bisa disimpulkan maka hanya 7% pelaku UMKM di Tasikmalaya yang menggunakan media website sebagai media promosi.
3	(Herdiana et al., 2022)	Pelatihan Skill Literasi Digital dalam Pengelolaan Data bagi Pelaku Usaha UMKM	Hasil dari pengabdian ini diwujudkan dengan capaian yang memuaskan dengan dilihat dari tingkat partisipasi peserta dan tingkat pemahaman peserta tentang pelatihan literasi digital. Kemudian tindak lanjut setelah terlaksananya kegiatan ini adalah mulai terbukanya sebuah kesempatan peningkatan usaha dari UMKM pada Desa Santana Mekar dengan melalui pemanfaatan digital marketing. Pemateri pertama menjelaskan

			bagaimana cara menemukan bisnis baru dengan mudah, bagaimana agar sebuah bisnis pelaku UMKM dapat mudah diakses melalui Google Maps dan Google Search. Kemudian setelah selesai materi pertama peserta diajarkan bagaimana menggunakan Google Trends guna mengumpulkan informasi bagi bisnis tersebut.
4	(Bachtiar et al., 2022)	Mendukung Transformasi Digital Usaha Mikro dan Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Pandemi COVID-19	Usaha Mikro Kecil (UMK) DIY terkena dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan setelah pengumuman dari pandemi virus Covid-19 oleh pemerintah Indonesia pada Maret 2020. Hasil dari analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pandemi telah mempercepat pertumbuhan teknologi digital di kalangan pelaku UMK. Berdasarkan datanya selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan UMK yang menggunakan marketing digital dari 43,13% pada 2018 dan tahun 2020 menjadi 59,64%. Penggunaan paling banyak digunakan untuk komunikasi dengan konsumen, pencarian informasi, dan jual beli online. Kemudian pada tahun 2023 adanya sebuah target untuk mencapai percepatan transformasi digital dengan 30 juta UMK yang sudah go digital, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai jumlah tersebut. Oleh karena itu sangat penting peran dari KemenkopUKM dan Pemda DIY dalam membedakan UMK berdasarkan motif dari usahanya. Dalam usahanya perlu dilakukan pencapaian target go digital yang difokuskan pada UMK, diperlukan peningkatan literasi digital, dan tantangan-tantangan lain dalam transformasi digital.
5	(Agung et al., 2022)	Literasi Digital Pelaku Umkm Dalam Upaya Menciptakan Berkelanjutan Bisnis	Dari kajian literatur menjelaskan bahwa pandemi covid 19 telah memberikan dampak terhadap perkembangan usaha. Banyak dari pelaku UMKM yang berusaha berjuang dan semakin berjuang dengan menggunakan penggunaan teknologi informasi digital. Akan tetapi, sebagian

			<p>pelaku UMKM dengan terpaksa untuk menutup usaha yang dirintis karena menurunnya pembelian dan minat dari konsumen. Maka dari itu digitalisasi sangat diperlukan pada era sekarang. Termasuk bagi pelaku UMKM demi bisa bersaing di pasar digital dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Melalui bisnis digital pelaku UMKM mampu menjangkau konsumen secara luas. Dengan demikian transformasi pada perkembangan teknologi digital dapat dijadikan sebagai kunci untuk merealisasikan bisnis berkelanjutan.</p>
6	(Handayani, 2023)	Digitalisasi UMKM: Peningkatan Kapasitas melalui Program Literasi Digital	<p>Digitalisasi adalah salah satu upaya agar UMKM bisa semakin berkembang dan bersaing di era revolusi industri 4.0. UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital akan memperoleh sejumlah manfaat seperti; dapat memperluas pasar, mudah dalam monitoring operasional usaha, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya untuk aktivitas yang lebih efisien (misalnya pemasaran, logistik, dan pengiriman). Salah satu tantangan untuk mewujudkan transformasi digital UMKM adalah tingkat literasi yang belum merata dari para pelaku usaha. Tantangan ini perlu dihadapi dengan meningkatkan kapasitas mereka melalui program literasi digital. Selama ini sudah banyak program sejenis yang diselenggarakan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian, asosiasi, e-commerce, dan perguruan tinggi. Program literasi digital ini dilakukan dengan konsep kolaborasi maupun independen oleh lembaga terkait. Dalam konteks akselerasi digitalisasi UMKM, program yang dikembangkan dengan konsep sinergi antara lembaga perlu dioptimalkan sehingga memberikan impact yang lebih luas, pengembangan UMKM yang merata di seluruh wilayah di tanah air.</p>

(Sumber: diolah oleh peneliti)

## 2. Agile Governance

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka Agile Governance

1.	(Nur, 2022)	Collaborative Governance in The UMKM Juara Program as an Effort to Increase the Competence of West Java Enterprises	Pembahasan yang merujuk pada teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari program UMKM Juara belum secara merata menerapkan dari konsep kolaborasi governansi yang ideal dalam peningkatan kelas usaha yang terletak di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena belum terpusatnya seluruh prinsip dari hubungan setiap stakeholders dan belum tersebarnya pendistribusian kapabilitas yang ada. Dari penelitian yang ada, beberapa indikator tidak terpenuhi sehingga dapat mempengaruhi sebuah kolaborasi yang akan dilakukan. Maka dari itu, dalam rangka untuk mengoptimalkan kolaborasi dari program UMKM Juara perlu menggunakan konsep perbaikan daripada tindakan.
2.	(Muttaqin & Permatasari, 2023)	Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Muhamad	Pemerintahan Negara Indonesia telah menerapkan konsep agile governance dalam menghadapi indikasi resesi yang terjadi pada tahun 2023 dengan baik. Dalam menghadapi problematik itu pemerintah menerapkan enam prinsip agile governance. Hal tersebut dibuktikan pada peresmian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dalam upaya pengintegrasian UMKM.
3.	(Halim et al., 2021)	Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat	Adanya Agile Governance dalam tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat karena memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Implementasi Agile Governance pada masa pandemi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Penerapannya pada aplikasi Pikobar Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah Jawa barat belum menerapkan dari tiga prinsip <i>agile governance</i> . Karena aplikasi Pikobar masih perlu adanya suatu perbaikan dalam aspek sistematis.

4.	(Darumurti et al., 2023)	Agile Governance Dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Inovasi Bantul Sehat Ekonomi Karo Jamu)	Sejak awal kemunculan Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sebuah dampak yang besar terhadap pelayanan publik di pemerintahan. Hadirnya sebuah program yang bernama Bantul Saroja yang memiliki fungsi sebagai integrasi antara pelayanan kesehatan konvensional dengan tradisional. Pelaksanaan Bantul Saroja sudah dilaksanakan pada 9 puskesmas pada tahun 2021.
5.	(Basyari et al., 2023)	Implikasi Penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di Kabupaten Sleman	Sebuah sistem e-voting dalam pemilihan nasional maupun regional bukan merupakan suatu hal yang baru. Sistem ini dilaksanakan sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan pemilihan secara e-voting. Penerapan sistem ini telah dilakukan di Kabupaten Sleman yang diterapkan di 35 kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman dalam pemilihan lurah secara elektronik. Manfaatnya juga dirasakan oleh lansia karena mempermudah mereka dalam menyalurkan aspirasi.
6.	(Apriliyanti et al., 2021)	Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya	Penanganan Covid-19 di Indonesia dilaksanakan dengan desentralisasi dengan dasar otonomi daerah. Dengan menerapkan prinsip Agile Governance dapat membantu pemerintah daerah Surabaya untuk menjadi adaptif dan proaktif dalam menghadapi permasalahan covid-19. Namun pada penerapannya pemerintah mengalami masalah pada sifat dan kebudayaan masyarakat Surabaya. Dengan kegigihan pemerintah dalam menjalankan Agile Governance akhirnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mampu menurunkan pandemi covid-19.
7.	(Yogar et al., 2023)	Jogja Smart Service as a digital public services: based on agile governance perspective	Jogja Smart Service (JSS) bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik dari pemerintah dengan hanya mengakses melalui media digital. Hal ini juga terkait dengan penerapan prinsip Agile Governance yang mengedepankan kecepatan dan ketepatan pada layanan publik. Namun terdapat beberapa indikator yang belum

			terpenuhi oleh JSS akan tetapi adanya JSS merupakan suatu terobosan yang sangat bermanfaat.
8.	(Mutiarin et al., 2022)	Formulating of E-Participation Design in Realizing Agile Government Based on Technology and Information: A Case Study in Indonesia	terdapat empat kesimpulan dalam penelitian e-paticipation dalam mewujudkan agile government berbasis teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya: Masyarakat belum bisa mengakses secara keseluruhan, pemerintah belum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan rencana pembangunan, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah karena tidak adanya kepercayaan dari masyarakat dan sebaliknya, dan masyarakat harus tetap terlibat karena teknologi saat ini sudah canggih, sehingga tidak baik jika tidak dimaksimalkan.

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibahas oleh peneliti diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian mengenai implementasi agile governance dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM menjadi sebuah penelitian yang menarik karena sebuah literasi digital merupakan suatu hal yang krusial sehingga pelaku UMKM harus mengikuti perkembangan zaman jikalau usahanya ingin maju dan terus berkembang kemudian didukung oleh konsep dari agile governance dimana setelah UMKM sudah menggunakan teknologi digital maka pelaku UMKM dituntut untuk bergerak cepat dan terus beradaptasi mengikuti perubahan zaman.

Secara umum dari penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi agile governance dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM. Namun dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai implementasi agile governance dalam meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bantul tahun 2020 sampai 2022. Kemudian yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini

membahas tentang perkembangan teknologi digital pada pelaku UMKM Kabupaten Bantul dengan menerapkan konsep dari agile governance.

## F. Kerangka Teori

### 1. Implementasi

Implementasi mempunyai dua pokok pengertian yang pertama secara bahasa implementasi berarti pelaksanaan dan penerapan. Kedua, secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah dirangkai dengan cermat, matang, dan terperinci. Implementasi dilaksanakan jika sudah ada perencanaan yang matang sehingga sudah ada kepastian yang jelas dalam rencana tersebut. Implementasi juga mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan puncak dari kegiatan (Lestari et al., 2020)

Kemudian dalam jurnal (Efendi & Abu Suhud, 2019) implementasi merupakan sebuah rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu, identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Jika sebuah program telah diterapkan, maka proses perumusan dari kebijakan yang akan dilaksanakan adalah implementasi. Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.

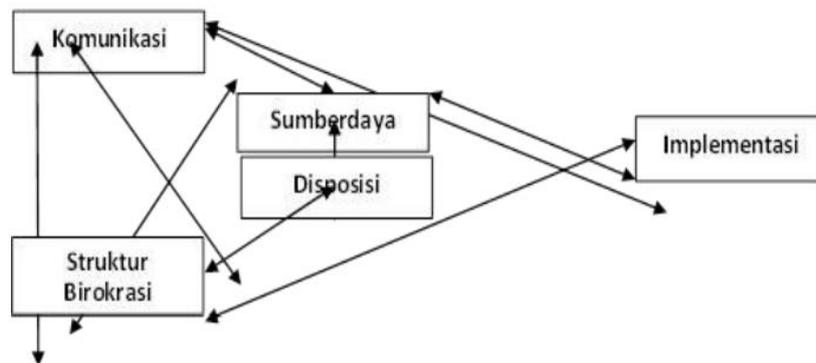
Pengertian implementasi dijelaskan menurut Mazmanian dan Wahab pada jurnal (Imronah, 2008) merupakan memahami apa yang harus senyatanya terjadi sesudah program berlaku telah dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah kebijakan negara. Implementasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada suatu yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Wahab juga menyatakan ada tiga sudut pandang dalam proses implementasi, yakni;

- Pemeriksa kebijakan (*the center*)

- Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*)
- Aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program pemerintahan itu diberikan, yaitu kelompok sasaran (*target group*)

Menurut artikel dari (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) implementasi merupakan kegiatan untuk menyalurkan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok target dalam upaya untuk menciptakan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan dapat muncul ketika keluaran kebijakan dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh kelompok yang menggunakan sehingga dalam kurun waktu yang panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yang dibahas dalam artikel (Nursalim, 2017) yaitu:



Gambar 4. Empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

- Komunikasi

dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi harus disampaikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas. Kemudian implementasi dapat berjalan lancar jika yang bertanggungjawab pada proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

- Sumber Daya

Sumber daya yang tergolong penting meliputi staff yang tepat pada bidang keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup relevan tentang cara dalam implementasi kebijakan dan terlaksananya terhadap siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta termasuk fasilitas (bangunan, tanah, peralatan, dan perediaan) yang digunakan untuk kepentingan publik. Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia saja, namun juga mencakup kepada sumber daya manusia yang dapat mendukung implementasi tersebut

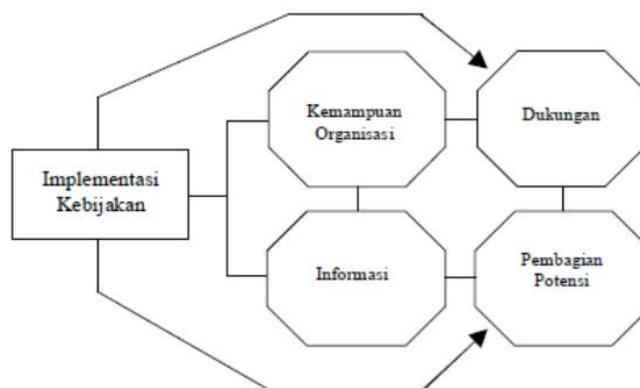
- Disposisi

Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan oleh para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara serius sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Jika implementasi dapat dilaksanakan dengan lancar para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

- Struktur Birokrasi

Sebuah implementasi belum efektif karena ketidakefisienan struktur dari birokrasi. Struktur birokrasi merupakan hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengatur serta mengkoordinasikan sumber daya demi mencapai tujuan.

Dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Warwick dalam jurnal (Trisnanto, 2015) yakni:



Sumber: Warwic dalam Kadji (2015:70)

- Kemampuan organisasi

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan sebuah tugas dan kewajiban yang seharusnya, seperti yang telah diterapkan pada suatu organisasi. Kemampuan dalam berorganisasi terdiri dari tiga pokok bahasan yaitu: kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain, kemampuan teknis, dan kemampuan dalam meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan *Standart Operating (SOP)*.

- Informasi

Minimnya informasi yang diberikan dari para aktor terhadap objek suatu kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi dengan objek kebijakan.

- Dukungan

Minimnya tersediaan objek-objek kebijakan kegiatan atau kewajiban tertentu dengan kepatuhan mereka makin sedikit apabila isi kebijakan bertentangan dengan pendapat keputusan.

- Pembagian Potensi

Pembagian tanggung jawab dan wewenang kurang disamakan dengan pembagian tugas seperti pembatasan yang kurang jelas dengan adanya disentralisasi pelaksanaan.

## **2. Agile Governance**

Agile governance secara harfiah terbagi menjadi dua kata yaitu agile dan governance. Agile sendiri menurut (Mahendra & Eby Yanto, 2018) merupakan metode dari pengembangan yang berfokus pada perkembangan cepat yang menggunakan teknologi digital, meminimalisir *overhead proses*, perangkat lunak yang dirilis secara bertahap, dan memproduksi kode berkualitas tinggi serta pada proses perkembangannya mengaitnya konsumen secara langsung.

Sedangkan governance menurut (T. Kurniawan, 2007) merupakan sebuah kebijakan yang didalamnya dilaksanakan dengan melibatkan tiga aktor yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian agile governance menurut (Huang et al., 2014) merupakan sebuah kemampuan dari organisasi dalam hal mempratiskan anggaran dan membaca adanya peluang dengan tepat dan cepat sehingga dapat memunculkan suatu tindakan yang kompetitif dan inovatif. Kemudian agile governance merambah pada konsep pelayanan organisasi pemerintah atau publik yang berbasis teknologi informasi secara signifikan.

Menurut pendapat ahli (Muttaqin & Permatasari, 2023) bahwa konsep agile governance ini begitu dibutuhkan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, tanggap, dan cekatan dengan birokrasi yang berintegritas dan profesional dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Kemudian agile governance hadir guna memberikan sebuah support kepada seseorang agar dapat menerapkan organisasi yang daptif dan mampu memberikan suatu peningkatan pada proses produktivitas wilayah.

Tabel 1.3 Indikator Agile Governance

NO	Agile Governance	
1	Asal konsep	Merupakan sebuah reaksi dari konsep perencanaan ( <i>waterfall planning</i> ) pada software engineering. Kemudian setelah perkembangan zaman konsep agile governance diadopsi dan merambah arah ke organisasi pemerintahan.
2	cakupan	Biasanya diterapkan pada proyek pembangunan dan inovasi publik.
3	Motivasi utama	Untuk memuaskan konsumen
4	Tujuan utama	Untuk menganalisa sebuah keadaan dan menanggapi secara cepat.
5	Proses inti	Dilakukan secara bertahap dengan inovasi yang selalu bertambah, menerima saran dan masukan secara cepat dan menjadikanya sebagai evaluasi untuk ters berkembang

6	Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan yang terjadi melalui teknologi dengan respon yang cepat.</li> <li>- Tata kelola yang jelas sehingga dapat mempercepat respon.</li> <li>- Mengatur untuk mengambil keputusan lama akan tetapi melaksakannya dengan respon yang cepat.</li> <li>- Berfokus pada perbaikan internal dan masalah organisasi.</li> <li>- Perubahan-perubahan kecil yang banyak namun berkelanjutan.</li> </ul>
7	Kritik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prediksinya tidak terlalu akurat serta susah dalam menjaga sebuah inovasi agar sesuai dengan jalannya.</li> <li>- Terlalu fokus kepada kerjasama eksternal dengan tujuan guna memperkenalkan serta memperluas informasi tentang perubahan</li> <li>- Masalah terhadap tata kelolanya karena sumber daya yang seringkali tidak berubah sehingga prioritas kegiatan perlu dilakukan.</li> </ul>

Sumber: (Janssen & Voort, 2020)

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai agile governance yakni agile governance merupakan suatu pemerintahan yang diwajibkan untuk mampu bergerak tangkas dan adaptif saat menemukan hal-hal baru dan rumit dalam suatu permasalahan yang akan di hadapi oleh masyarakat luas. Kemudian pemerintah diwajibkan juga untuk menganalisis situasi yang terjadi, atau bahkan hal yang belum terjadi.

Menurut pendapat pada jurnal (Luna et al., 2015) Agile governance memiliki enam prinsip yang perlu diketahui dalam penerapannya dalam dunia pemerintahan diantaranya adalah:

1. Good enough governance: yang berarti organisasi pemerintah yang baik memerlukan sebuah tata kelola yang baik juga.
2. Business Driven: sebuah konsep dari agile governance perlu guna diterapkan kepada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dan organisasi publik dituntut untuk

memberikan inovasi ataupun ide dalam mendukung perkembangan perekonomian rakyat.

3. Human focused: fokus utama dari organisasi pemerintahan adalah melayani masyarakat tanpa membedakan dari suku, agama, dan ras.
4. Bases on quick wins: dengan berkembang perubahan secara cepat dalam keadaan masyarakat pemerintah dituntut untuk tanggap, inovatif, dan cepat.
5. Systematic and adaptive approach: dalam penerapannya perlu dilakukan secara sistematis dan adaptif dalam hal pendekatan agar mendapatkan hasil yang maksimal.
6. Simple design and continuous refinement: sebuah ide atau inovasi yang tercipta harus mempunyai sebuah makna yang berguna bagi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang.

### **3. Literasi Digital**

Literasi digital diusung dari salah satu tokoh terkenal yaitu oleh Paul Gilster pada tahun 1997. Paul Gilster memaknai literasi digital merupakan sebuah ketrampilan atau kemampuan pada diri seseorang guna untuk memahami serta menggunakan informasi dari berbagai macam sumber digital secara efisien dan efektif dalam berbagai format (Rodin & Nurrizqi, 2020). Kemudian dari (Bawden, 2001) menegaskan bahwa literasi digital sebenarnya lebih berfokus kepada literasi informasi dan literasi komputer. Literasi komputer sendiri sudah ada semenjak tahun 1980an dan baru menyebar luas pada tahun 1990an.

Menurut analisis dari UNESCO makna dari literasi adalah sebagai sebuah perangkat keterampilan. Ada tiga aspek keterampilan yaitu keterampilan membaca, menulis, dan kognitif. Dari tiga aspek tersebut bisa didapatkan dari berbagai sumber, yakni penelitian akademi, pendidikan, dan pengalaman. Kemudian literasi digital merupakan upaya dalam memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Literasi digital sendiri dibagi menjadi dua,

yaitu kemampuan teknis serta literasi informasi yang menekankan dalam aspek pengetahuan dan literasi informasi yang menekankan dalam aspek pemahaman teknologi digital.

Martin menerangkan lebih detail bahwa literasi digital merupakan sebuah kemampuan pada individu dalam menggunakan alat digital secara sesuai sehingga dapat menjembatani dalam mengelola, mengakses, mengevaluasi, dan mengintegrasikan sumber daya digital dalam membangun pengetahuan dan inovasi yang baru untuk mewujudkan pembangunan sosial. Terdapat beberapa dimensi literasi digital sebagai berikut

1. Literasi digital secara individual tergantung pada situasi sehari-hari yang ia alami dan juga proses sepanjang hidup sebagaimana situasi hidup individu
2. Literasi digital melibatkan pada kemampuan aksi digital yang terikat kerja, pembelajaran, dan aspek lainnya pada kehidupan sehari-hari.
3. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan data dan menggunakan pengetahuan, teknik, dan kualitas individu. Selain itu ada tiga kemampuan yang harus dimiliki, yakni kemampuan menjalankan, merencanakan, dan mengevaluasi tindakan digital sebagai bahan penyelesaian masalah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital tidak hanya membahas tentang kemampuan maupun keterampilan dalam mengoperasikan teknologi akan tetapi kemampuan dalam membaca dan memahami sebuah informasi yang telah disampaikan dari media digital dengan menggunakannya dengan cerdas, bijak dan tepat dalam rangka membangun komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi solusi yang baik dan inovatif dalam proses perkembangan.

Menurut Belshaw (2012) dalam sebuah tesis yang dia kerjakan yang berjudul *What is Digital Literacy?* Mengatakan bahwa ada elemen esensial dalam mengembangkan literasi digital, sebagai berikut:

1. Kultural adalah sebuah pemahaman yang beragam pada konteks dunia digital
2. Konstruktif adalah rekayasa sesuatu yang ahli dan aktual
3. Kognitif adalah sebuah daya pikir dalam menilai konten
4. Komunikatif yang berarti dapat memahami kinerja komunikasi dan jejaring dalam dunia digital
5. Kreatif dengan menciptakan hal baru dengan cara baru
6. Kritis dalam menyikapi sebuah konten
7. Kepercayaan diri
8. Bertanggung jawab secara sosial.

Menurut (Irhandayaningsih, 2020) Konseptualisasi dari literasi digital terdiri dari empat komponen utama, yakni latar belakang pengetahuan informasi, kompetensi utama literasi digital, kemampuan dasar literasi digital dan sikap perspektif pengguna informasi. Berdasarkan empat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Latar belakang pengetahuan informasi

Latar belakang pengetahuan informasi yaitu sebuah pembahasan mengenai pemahaman yang diperlukan suatu individu dalam bagaimana informasi digital dan non digital digunakan serta bagaimana sumber informasi menghasilkan sesuai keinginan.

- b. Kompetensi utama literasi digital

Kompetensi utama literasi digital memuat dari pemahaman akan format informasi digital dan non digital, kemampuan dalam menghasilkan informasi digital, kemampuan guna mengevaluasi informasi yang diperoleh, keterampilan literasi informasi, kemampuan penerapan pengetahuan serta keterampilan literasi media.

- c. Kemampuan dasar literasi digital

Kemampuan dasar literasi digital terdiri dari keterampilan dasar yang berupa kemampuan untuk membaca, menulis, memahami simbol dalam mempresentasikan

bahasa dan melakukan perhitungan angka, serta kemampuan dasar literasi komputer yang termasuk dalam kemampuan memakai hardware.

d. Sikap dan prespektif pengguna informasi

Sikap dan prespektif pengguna informasi merupakan kemampuan individu dalam mempelajari secara mandiri, pemahaman penggunaan informasi, dan pemahaman mengenai hak cipta.

Dalam literasi digital terdapat beberapa faktor-faktor penting dalam penyaringan informasi dengan baik dan benar menurut (Naufal, 2021). Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Keterampilan fungsional

Merupakan sebuah kemampuan teknik yang diperlukan dalam menjalankan berbagai digital dengan lancar. Bagian terpenting adalah mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Fokusnya merupakan apa yang dapat dilakukan dengan alat agar dapat digunakan secara efektif

- Komunikasi dan interaksi

Marupakan sebuah percakapan, diskusi, serta membangun konsep guna untuk menciptakan pandangan bersama. Dengan berarti kemampuan yang melibatkan kolaborasi agar teknologi digital dapat efektif ddalam mendukung prosesnya agar lebih luas

- Berfikir kritis

Pemikiran yang melibatkan analisis, perubahan, atau proses informasi data yang diberikan untuk menafsirkan makna dalam pengembangan wawasan. Sebagai komponen literasi digital juga melibatkan kemampuan dalam menggunakan ketampilan penalaran agar terlibat dengan media digital lalu melaksanakan evaluasi.

## G. Definisi Konseptual

Setelah beberapa penjelasan terkait kerangka teori diatas yang akan digunakan dalam penelitian ini maka beberapa definisi secara konseptial dapat tersimpulkan sebagaimana berikut:

1. Implementasi merupakan penelitian yang merujuk pada tahap dimana peneliti meimplementasikan rencana penelitian yang telah dirancang dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian mereka.
2. Agile Governance merupakan kemampuan dari organisasi pemerintah ataupun organisasi publik dalam merespon secara cepat dan tepat akan perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah serta menjaga keseimbangan dalam proses penerapannya antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Literasi digital merupakan kemampuan dari individu dalam menggunakan, mengevaluasi, memahami, dan ikut serta dalam dunia digital yang efektif ini. Literasi digital melibatkan banyak komponen yang harus dimiliki semisal keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mempraktekan teknologi digital dalam era yang semakin kompleks.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional mempunyai kepentingan dalam membatasi keadaan sosial yang akan menjadi fokus penelitian. Kajian yang berada dalam definisi operasional merupakan batasan-batasan agar penelitian untuk mempermudah penulis dalam mengambil sebuah fenomena sosial yang terjadi.

Tabel 1.4 Definisi Operasioanal Agile Governance

NO	Variabel	Indikator	Parameter
1	Agile Governance	<i>Good enough governance</i>	Mengkaji tentang: - Tata kelola Sumber Daya Manusia

2		<i>Business driven</i>	Mengkaji tentang: - Tata kelola Finansial
3		<i>Human focused</i>	Mengkaji tentang: - Partisipasi masyarakat akan pengembangan literasi digital UMKM
4		<i>Based on quick wins</i>	Mengkaji tentang: - Reformasi pelayanan publik
5		<i>Systematic and adaptive approach</i>	Mengkaji tentang: - Respon pemerintah dan masyarakat terhadap inovasi program.
6		<i>Simple design and continous refinement</i>	Mengkaji tentang: - Mudah dan cepat untuk di akses.

Sumber: (Luna et al., 2015)

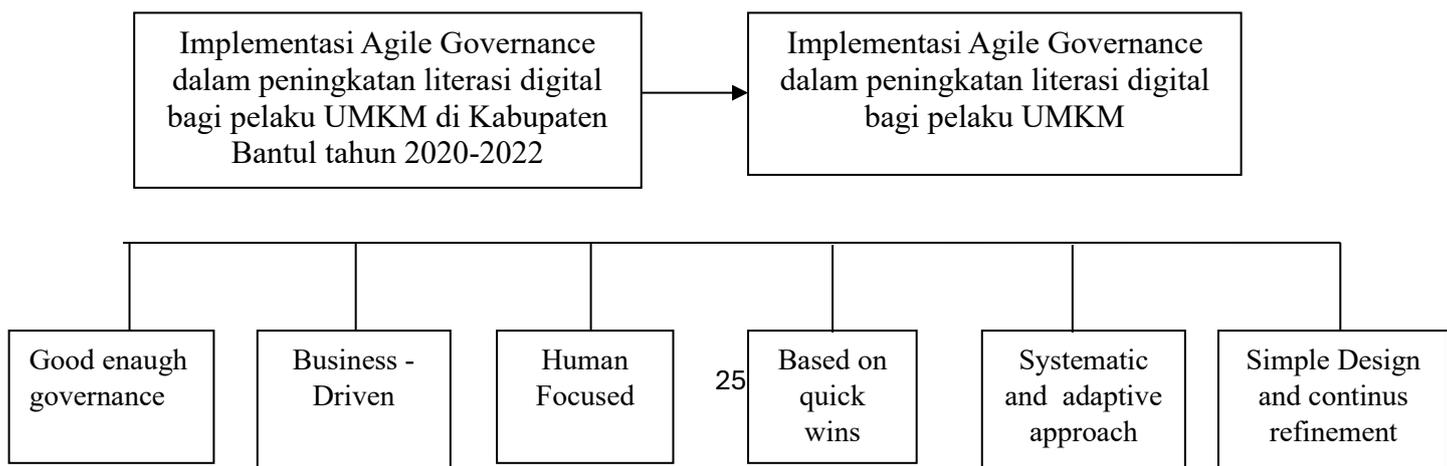
Tabel 1.5 Definisi Operasioanal Literasi Digital

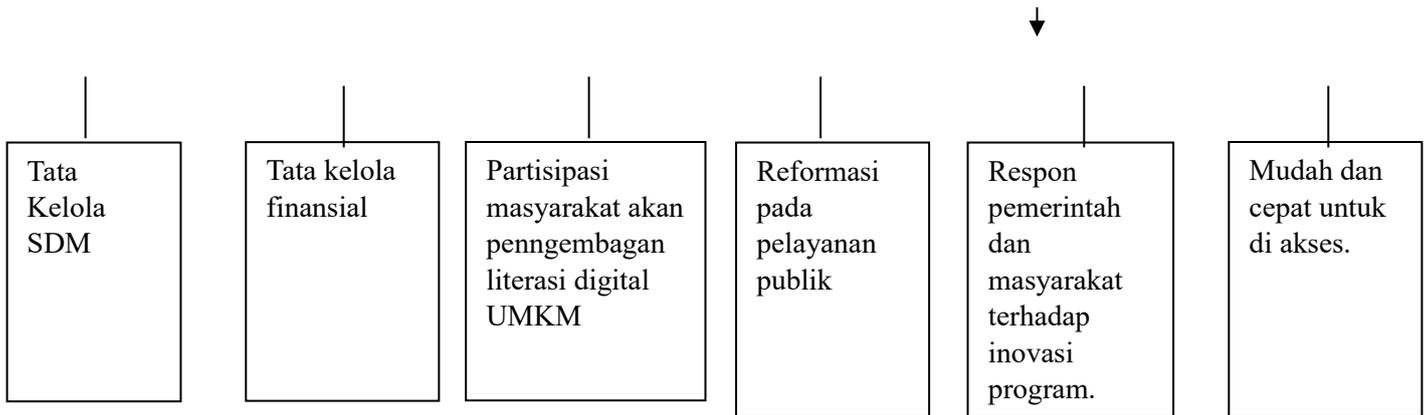
NO	Variabel	Indikator	Parameter
1	Literasi Digital	Pelatihan dan Pendidikan	Membantu pelaku UMKM untuk memahami teknologi dalam bisnis mereka
2		Penggunaan Platform E-commerce	Mendorong penggunaan platform e-commerce dalam bisnis
3		Infrastruktur Digital	Tersedianya akses internet yang stabil

Sumber: (Umiyati & Achmad, 2021)

### I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini akan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memberikan wawasannya serta tujuan dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. berikut kerangka berfikir yang disediakan dalam penelitian ini:





Sumber: olahan peneliti, 2023

## J. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2016) dalam bukunya metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat dan memahami suatu kondisi yang terjadi dalam penelitian yang digambarkan secara deskriptif. Sedangkan Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menerapkan terhadap realita problematika pembahasan yang dipahami betul oleh peneliti.

Sedangkan deskriptif menurut Sukmadinata dalam buku (Hardani et al., 2020) mengartikan bahwa deskriptif merupakan sebuah bagian penting dalam penelitian, karena guna mendeskripsikan suatu kondisi yang terjadi sehingga dapat membedakan suatu kondisi satu dengan lainnya meliputi dari karakteristik, bentuk, dan lainnya. Kemudian menurut Furchan penelitian deskriptif merupakan proses penelitian yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait fenomena yang sedang berkembang kompleks serta penelitian deskriptif berguna untuk menjabarkan sebuah data peneliti yang dikaji saat di lapangan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat meneliti lebih jauh mengenai implementasi Agile Governance dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bantul serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Guna untuk mengumpulkan dan menghimpun data terkait dengan Implementasi Agile Governance dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM. Lokasi ini dianggap penting oleh peneliti karena minimnya literasi digital bagi pelaku usaha Bantul dalam mempromosikan usahanya di media online dan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi Agile Governance yang sudah diterapkan pada pelaku UMKM.

## 3. Jenis Data Penelitian

### a. Data Primer

Menurut (Nurwanda & Badriah, 2020) merupakan data yang didapatkan berdasarkan pengamatan penelitian saat terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan memaksimalkan pencarian data berdasarkan data lapangan yang berasal dari proses wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dan beberapa pelaku UMKM Kabupaten Bantul.

Tabel 1.6 Daftar Narasumber

NO	Narasumber	Instansi/Jabatan	Teknik pengambilan Data
----	------------	------------------	-------------------------

1.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas UKM perindustrian dan perdagangan kabupaten Bantul	Wawancara
2.	Pelaku Usaha UMKM	-	Wawancara
3.	Admin pengelola Aplikasi	-	Wawancara

Sumber: diolah peneliti,2023

b. Data sekunder

Menurut (Nurwanda & Badriah, 2020) merupakan data yang secara tidak langsung didapat dari sumber awal atau telah mengalami pengolahan lembaga atau instansi pengumpul data serta data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini merupakan data pendukung dan tambahan guna mendukung data primer. Data sekunder bisa didapatkan melalui dokumen pemerintah, jurnal, maupun internet

Tabel 1.7 Daftar data sekunder

NO	Nama Data	Teknik pengambilan data
1	Data jumlah UMKM Go digital	Dokumentasi
2	Data jumlah pendaftar UMKM di Sidakui	Dokumentasi
3	Data perkembangan UMKM tahun 2020-2022	Dokumentasi
4	Website atau Aplikasi Sidakui	Dokumentasi dan Observasi

Sumber: diolah peneliti

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dari peneliti untuk mrndapatkan data penelitian yang konkrit, akurat dan spesifik.

a. Wawancara

Berdasarkan artikel jurnal (Pratiwi, 2017) dari buku Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dari dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui pembicaraan tanya jawab, kemudian dapat dibangun pembicaraan topik tertentu. Dalam wawancara ini akan mencari permasalahan-

permasalahan yang dapat diteliti lalu dipecahkan. Pada penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap pihak yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dan beberapa pelaku UMKM.

b. Observasi

Menurut (Hasanah, 2017) observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengamati dan memahami sebuah fenomena atau kejadian dalam konsteks alamiah pada lokasi penelitian. Observasi pada penelitian ini akan digunakan dalam melihat kondisi dan lokasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dan beberapa pelaku UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian kualitatif mengarah pada proses saat pengumpulan, pengecekanm dan penyimpanan semua informasi catatan, data, dan bahan penelitian yang cocok untuk penelitian ini. Dokumentasi merupakan suatu hal penting pada penelitian karena pada penelitian ini seringkali melibatkan pada analisis data yang kompleks.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian dalam melaksanakan penelitian. Karena dengan adanya suatu analisis data maka peneliti dapat mengetahui seberapa cocok data yang didapatkan melalui metode penelitian. Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, menurut Miles dan Huberman dalam buku (Hardani et al., 2020) diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses dari pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari hasil observasi catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Kemudian reduksi data dapat menganalisis, menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan. Sehingga dengan cara seperti itu dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bisa diverifikasi.

b. Penyajian data

Merupakan sebuah kumpulan dari informasi tersusun yang memberikan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data maka peneliti dapat memberikan gambaran secara deskriptif dari hasil penelitiannya. Beberapa contoh dari penyajian data antara lain: tabel, grafik, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam pada objek yang diteliti, dan penyampaiannya lebih terbuka dan fleksibel.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana pada tahap ini merangkum terhadap keseluruhan hasil dari penelitian. Dengan adanya kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penelitian.